

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Kesimpulan Umum

LSM BIGS telah melakukan peran kontrol sosial-nya sebagai salah satu LSM. BIGS telah melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, diataranya dengan mengadakan program-program pencegahan tindak pidana korupsi. Program-program terkait upaya pencegahan tindak pidan korupsi yang dilakukan oleh BIGS adalah program pendidikan politik anggaran, advokasi kebijakan pemerintah dan program klinik anti korupsi. BIGS menggunakan beberapa langkah dalam menjalankan program-programnya. Dalam proses menjalankan programnya, BIGS tidak selalu berjalan dengan mulus tetapi menemui kendala-kendala. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, BIGS melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

##### 2. Kesimpulan Khusus

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Lembaga swadaya masyarakat merupakan kontrol sosial bagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lembaga Swadaya masyarakat *Bandung Institute of Governance Studies* (BIGS) memiliki peran terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di Indonesia. Program-program yang dijalankan oleh BIGS dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diantaranya adalah program pendidikan politik anggaran, program advokasi keterbukaan informasi publik, dan program klinik anti korupsi,
- b) Dalam menjalankan program-programnya, *Bandung Institute of Governance Studies* (BIGS) menggunakan Metode training/pelatihan, lokakarya, seminar, audiensi dengan pejabat publik dan melakukan riset. Media yang bervariasi sehingga dapat memudahkan jalan utuk keberhasilan upaya

**Dede Iyan Setiono, 2013**

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Bandung Institute of Governance Studies/BIGS di Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pencegahan tindak pidana korupsi diantaranya dengan menerbitkan *bulletin*, *policy paper* dan *news letter*. BIGS juga tidak berjalan sendiri dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, tetapi melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap dapat menyelesaikan ini secara bersama-sama. Pihak yang bekerjasama dengan BIGS antara lain adalah pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat pada umumnya.

- c) Dalam menjalankan program-programnya, BIGS tidak selamanya berjalan dengan mulus akan tetapi ada saja kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sikap tertutupnya para pemangku kebijakan, hal ini membuat sulit untuk menggali informasi tentang kebijakan anggaran publik. Kurangnya kesadaran politik masyarakat juga menghambat kelancaran program. Efektifitas pelaksanaan program dan penggunaan metode yang kurang tepat. Adanya beberapa pihak yang memandang rendah LSM dan lebih parah lagi yang memandang LSM dengan konotasi negatif. Selain itu sokongan atau bantuan dana juga berpengaruh besar bagi kelancaran program BIGS.

Oleh karena itu BIGS senantiasa bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk kelancaran usahanya.

- d) Dalam mengatasi kendala yang terjadi, BIGS melakukan upaya-upaya diantaranya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas program yang dijalankan, yaitu dengan cara menjalin kemitraan dengan pemerintah dan warga, menambah kapasitas pengetahuan sumberdaya manusia yang ada, melakukan quality control terhadap program-program yang sedang berjalan, serta dengan menerapkan monitoring dan evaluasi untuk setiap program.

Meningkatkan efektifitas metode yang digunakan, yaitu dengan cara terus mengasah keterampilan sumber daya manusia yang ada, melakukan knowledge management sehingga dapat lebih bervariasi, lebih inovatif dan lebih efektif.

Peningkatan partisipasi masyarakat lebih banyak lagi yairtu dengan cara mendesain program semenarik mungkin supaya dilirik oleh masyarakat,

menulis di beberapa media masa dan melakukan penerbitan-penerbitan bulletin.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

### **1. Untuk BIGS**

- a) Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, BIGS mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang manggung, BIGS yang mempunyai peran kontrol sosial sudah semestinya melakukan kontrol terhadap pemerintahan, dan alangkah lebih baiknya jika pengawasan itu lebih ditingkatkan lagi.
- b) Kordinasi antara BIGS dan pemerintah yang sedang manggung seharusnya lebih ditingkatkan lagi, hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya cikal bakal tindak pidana korupsi.
- c) BIGS yang notabene berasal dari kumpulan masyarakat yang peduli akan keadaan masyarakat pada umumnya, semestinya lebih meningkatkan partisipasi masyarakat lebih banyak lagi.
- d) BIGS harus lebih meningkatkan kualitas program dan efektifitas penggunaan metode, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan lagi hasil dari program-program yang dijalankan.

### **2. Untuk Pemerintah**

- a) Pemerintah sebagai lembaga pemegang kekuasaan seharusnya lebih transparan dalam menentukan anggaran publik.
- b) Peraturan-peraturan terkait dengan anggaran publik seharusnya disosialisasikan seoptimal mungkin kepada masyarakat, sehingga tidak muncul kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat (miskomunikasi).

**Dede Iyan Setiono, 2013**

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Bandung Institute of Governance Studies/BIGS di Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c) Adanya koordinasi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah dalam memantau proses berjalannya kebijakan, dan mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### 3. Untuk Masyarakat

- a) Masyarakat harus lebih peka dalam menyikapi peraturan-peraturan pemerintah khususnya di sektor anggaran publik.
- b) Masyarakat seharusnya meningkatkan partisipasi dalam upaya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya adalah dengan ikut terlibat dengan kegiatan-kegiatan LSM dalam pengawasan anggaran publik.
- c) Peningkatan wawasan politik masyarakat tidak dapat diperoleh secara instan, oleh karena itu dengan mengikuti perkumpulan-perkumpulan seperti lembaga swadaya masyarakat pengetahuan masyarakat dapat meningkat.

### 4. Untuk Jurusan PKn

- a) PKn yang notabene memiliki tujuan *“to be good and smart citizen”*, seharusnya lebih meningkatkan lagi metode yang efektif bagi mahasiswa guna tercapainya tujuan tersebut.
- b) Jurusan PKn diharapkan untuk lebih meningkat memberikan pengajaran nilai dan moral kepada mahasiswa, guna bekal di kehidupan yang sebenarnya/masyarakat.
- c) Jurusan PKn diharapkan dapat menanamkan keyakinan kepada mahasiswa bahwa hidup bersih tanpa korupsi lebih baik dari pada hidup berlimpahan hasil korupsi.

### 5. Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai peran LSM, mengingat semakin merambahnya kasus korupsi di tatanan pemerintahan

**Dede Iyan Setiono, 2013**

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Bandung Institute of Governance Studies/BIGS di Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diharapkan dapat menggali lebih mendalam lagi tentang bagaimana LSM berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.



**Dede Iyan Setiono, 2013**

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Bandung Institute of Governance Studies/BIGS di Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)